

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori

2.1.1 Kemiskinan

1. Pengertian Kemiskinan

Kemiskinan merupakan permasalahan yang dihadapi oleh semua negara, baik negara maju maupun negara berkembang, namun lebih banyak terjadi pada negara berkembang, karena kondisi pembangunan yang masih belum stabil dan *sustainable*. Pada umumnya kemiskinan diukur dengan tingkat pendapatan dan kebutuhan pokok minimal suatu negara (Al arif, 2010).

Menurut Lincoln Arsyad (2010) kemiskinan itu bersifat multi dimensional. Artinya karena kebutuhan manusia itu bermacam-macam, maka kemiskinan pun memiliki banyak aspek. Dilihat dari kebijakan umum, maka kemiskinan meliputi aspek primer yang berupa sekunder yang berupa miskin akan jaringan sosial, sumber-sumber keuangan dan informasi. Dimensi-dimensi kemiskinan tersebut termanifestasikan dalam bentuk kekurangan gizi, air perumahan yang sehat, perawatan kesehatan yang kurang baik, dan tingkat pendidikan yang rendah.

Lincoln Arsyad (2010) menambahkan, kemiskinan adalah kelaparan, tidak memiliki tempat tinggal, bila sakit tidak mempunyai dana untuk berobat. Orang miskin itu umumnya tidak dapat membaca karena tidak mampu bersekolah, tidak memiliki

pekerjaan, takut menghadapi masa depan, kehilangan anak karena sakit. Kemiskinan adalah ketidak berdayaan, terpinggirkan dan tidak memiliki rasa bebas.

2. Garis Kemiskinan

Menurut Mudjarat Kuncoro pada tahun 2014, batas garis kemiskinan yang digunakan setiap negara ternyata berbeda beda ini disebabkan karena adanya perbedaan lokasi dan standar hidup. BPS menggunakan batas minimum dari besarnya rupiah yang dibelanjakan perkapita sebulan untuk memenuhi kebutuhan minimum makanan dan bukan makanan. Untuk kebutuhan minimum makanan digunakan patokan 2.100 kalori perhari sedangkan pengeluaran kebutuhan minimum bukan makanan meliputi pengeluaran untuk perumahan, sandang, serta aneka barang dan jasa. Garis kemiskinan (GK) menurut ukuran BPS terdiri dari dua komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Nonmakanan (GKNM), sehingga jika hal itu diformulasikan maka:

$$GK = GKM + GKNM$$

Penghitungan garis kemiskinan dilakukan secara terpisah untuk daerah perkotaan dan perdesaan. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.

3. Ukuran Kemiskinan

Ada beberapa konsep untuk mengukur suatu tingkat kemiskinan. Konsep yang mengacu pada garis kemiskinan disebut kemiskinan *relative*. Sedangkan konsep yang pengukuranya tidak didasarkan garis kemiskinan disebut kemiskinan *absolute* (Tri Widodo, 2006).

a. Kemiskinan Relatif

Orang yang sudah mempunyai tingkat pendapatan yang dapat memenuhi kebutuhan dasar namun masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan keadaan masyarakat sekitarnya, maka orang tersebut masih dianggap miskin. Hal ini terjadi karena kemiskinan lebih banyak ditentukan oleh keadaan sekitarnya, dari pada lingkungan orang yang bersangkutan (Subandi, 2014).

b. Kemiskinan *Absolute*

Kemiskinan *Absolute* atau mutlak adalah derajat kemiskinan di bawah, di mana kebutuhan minimum untuk bertahan hidup tidak dapat terpenuhi Tri Widodo (2006). Garis kemiskinan diartikan sebagai pengeluaran rata-rata atau konsumsi rata-rata untuk kebutuhan pokok berkaitan dengan pemenuhan standar kesejahteraan. Bentuk kemiskinan absolut ini paling banyak dipakai sebagai konsep untuk menentukan atau mendefinisikan kriteria seseorang atau sekelompok orang yang disebut miskin (Ahmad Mahyudi, 2004). Kesulitan dalam kemiskinan absolut adalah menentukan komposisi dan tingkat kebutuhan minimum karena kedua hal tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh adat kebiasaan saja, tetapi juga oleh tingkat kemajuan suatu negara, dan berbagai faktor ekonomi lainnya (Subandi, 2014).

4. Penyebab Kemiskinan

Todaro dalam Kuncoro (2006) menjelaskan bahwa adanya variasi kemiskinan di negara berkembang disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:

- 1) Luasnya negara
- 2) Perbedaan sejarah, sebagian dijajah oleh negara yang berlainan

- 3) Perbedaan kekayaan sumber daya alam dan kualitas sumber daya manusianya
- 4) Relatif pentingnya sektor publik dan swasta
- 5) Perbedaan struktur industri
- 6) Perbedaan derajat ketergantungan pada kekuatan ekonomi dan politik negara lain
- 7) Perbedaan pembagian kekuasaan, struktur politik dan kelembagaan dalam negeri.

2.1.2 Ketimpangan Pendapatan

Pada dasarnya distribusi pendapatan merupakan suatu konsep tentang penyebaran pendapatan di antara seseorang dengan orang lainnya atau di antara rumah tangga dalam masyarakat. Distribusi pendapatan biasanya diukur oleh dua konsep pokok, yaitu konsep ketimpangan absolut dan ketimpangan relatif. Ketimpangan absolut adalah konsep pengukuran ketimpangan yang didasarkan pada sebuah nilai mutlak. Sedangkan ketimpangan relatif merupakan konsep pengukuran ketimpangan distribusi pendapatan yang membandingkan besarnya pendapatan yang diterima seseorang atau suatu kelompok dengan total pendapatan yang diterima oleh masyarakat di daerah tersebut secara keseluruhan (Ahluwalia dalam Sukirno, 2006).

Untuk mengukur ketimpangan pendapatan di antara penduduk, ukuran yang digunakan berdasarkan pada ukuran *size distribution of income*. Namun, karena data pendapatan sulit diperoleh, maka pengukuran ketimpangan atau distribusi pendapatan selama ini didekati dengan data pengeluaran. Dalam hal ini, analisis distribusi pendapatan diperoleh dengan menggunakan data total pengeluaran rumah tangga sebagai proksi pendapatan, terkait dengan hal tersebut, terdapat empat ukuran yang

merefleksikan ketimpangan distribusi pendapatan yaitu Koefisien Gini (Gini Ratio), Ukuran Bank Dunia, Indeks Theil dan Indeks-L.

Menurut Todaro dan Smith (2006) Gini Ratio adalah salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Berikut rumus umum koefisien gini diperlihatkan pada persamaan 1.

$$GR = 1 - \sum_{i=1}^N [fp_i(fc_i + fc_{i-1})] \dots \dots \dots (Persamaan 1)$$

Di mana:

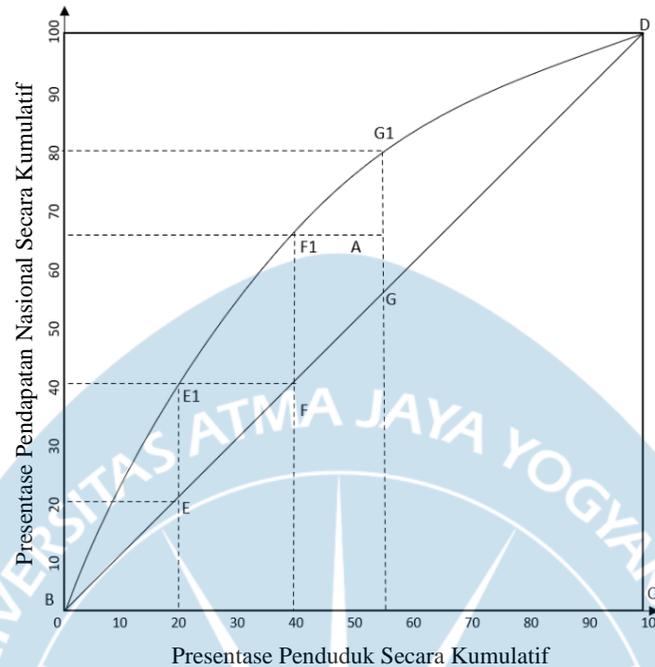
GR = Koefisien Gini (Gini Ratio)

Fpi = frekuensi penduduk dalam kelas pengeluaran ke-i

Fci = frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke-i

Fci-1 = frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke (i-1)

Dasar perhitungan koefisien gini berasal dari upaya pengukuran luas suatu kurva yang menggambarkan distribusi pendapatan untuk seluruh kelompok pendapatan yang biasa disebut Kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variabel tertentu. Dalam membentuk koefisien gini, grafik persentase kumulatif penduduk (dari termiskin hingga terkaya) digambarkan pada sumbu horizontal dan persentase kumulatif pengeluaran (pendapatan) digambarkan pada sumbu vertikal (Gambar 2.1).



Sumber: Todaro dan Smith (2006)

Gambar 2.1 Kurva Lorenz

Pada gambar 2.1 di atas, besarnya ketimpangan digambarkan sebagai daerah yang diarsir, sedangkan koefisien gini atau *gini ratio* adalah rasio (perbandingan) antara luas bidang A tersebut dengan luas segitiga BCD. Dari gambar tersebut dikatakan bila pendapatan didistribusikan secara merata, maka semua titik akan terletak pada garis diagonal. Artinya, daerah yang diarsir akan bernilai nol karena daerah tersebut sama dengan garis diagonal. Maka, angka koefisien sama dengan nol. Titik E mencerminkan titik pemerataan sempurna dimana 20% penduduk secara kumulatif memperoleh 20% pendapatan nasional secara kumulatif. Titik pemerataan sempurna adalah utopia (tidak mungkin terjadi) maka dari itu 20% penduduk secara kumulatif di asumsikan memperoleh bagian sebesar 40% (E1). Penjelasan tersebut berlaku untuk titik lainnya, F, F1, G, dan G1.

2.1.3 Pengangguran

Pengangguran adalah suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya. Seseorang yang tidak bekerja, tetapi tidak secara aktif mencari pekerjaan tidak tergolong sebagai penganggur. Pengangguran terjadi disebabkan oleh tidak seimbangnya pasar tenaga kerja. Hal ini menunjukkan jumlah tenaga kerja yang ditawarkan melebihi jumlah tenaga kerja yang diminta.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) dalam indikator ketenagakerjaan, pengangguran merupakan penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja.

Dalam standar pengertian yang sudah ditentukan secara internasional, yang dimaksudkan pengangguran adalah seseorang yang sudah digolongkan dalam angkatan kerja, yang secara aktif sedang mencari pekerjaan pada suatu tingkat upah tertentu, tetapi tidak dapat memperoleh pekerjaan yang diinginkannya.

Angkatan kerja meliputi populasi dewasa yang sedang bekerja atau sedang mencari kerja. Angkatan kerja terdiri dari golongan yang bekerja dan golongan yang menganggur. Golongan yang bekerja merupakan sebagian masyarakat yang sudah aktif dalam kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa. Sedangkan sebagian masyarakat lainnya yang tergolong siap bekerja dan mencari pekerjaan termasuk dalam golongan menganggur. Golongan penduduk yang tergolong sebagai angkatan kerja adalah penduduk yang berumur di antara 15 sampai 64 tahun. Bukan angkatan

kerja adalah bagian dari tenaga kerja yang tidak bekerja ataupun mencari pekerjaan, atau bisa dikatakan sebagai bagian dari tenaga kerja yang sesungguhnya tidak terlibat atau tidak berusaha terlibat dalam kegiatan produksi.¹⁰ Kelompok bukan angkatan kerja ini terdiri atas golongan yang bersekolah, golongan yang mengurus rumah tangga, dan golongan lain yang menerima pendapatan.

Maka menurut sebab terjadinya, pengangguran digolongkan kepada tiga jenis yaitu:

a. Pengangguran friksional

Pengangguran friksional adalah pengangguran yang terjadi karena kesulitan temporer dalam mempertemukan pencari kerja dan lowongan kerja yang ada. Kesulitan temporer ini dapat berbentuk sekedar waktu yang diperlukan selama prosedur pelamaran dan seleksi, atau terjadi karena faktor jarak atau kurangnya informasi. Pengangguran friksional tidak bisa dielakkan dari perekonomian yang sedang berubah. Untuk beberapa alasan, jenis-jenis barang yang dikonsumsi perusahaan dan rumah tangga bervariasi sepanjang waktu. Ketika permintaan terhadap barang bergeser, begitu pula permintaan terhadap tenaga kerja yang memproduksi barang-barang tersebut.

b. Pengangguran struktural

Pengangguran struktural terjadi karena ada problema dalam struktur atau komposisi perekonomian. Perubahan struktur yang demikian memerlukan perubahan dalam ketrampilan tenaga kerja yang dibutuhkan sedangkan pihak pencari kerja tidak mampu menyesuaikan diri dengan ketrampilan baru tersebut.

c. Pengangguran konjungtur

Pengangguran konjungtur terjadi karena kelebihan pengangguran alamiah dan berlaku sebagai akibat pengangguran dalam permintaan agregat.

Sadono Sukirno (2006) mengklasifikasikan pengangguran berdasarkan cirinya, dibagi menjadi empat kelompok:

a. Pengangguran Terbuka

Pengangguran ini adalah tenaga kerja yang sungguh-sungguh tidak mempunyai pekerjaan. Pengangguran jenis ini cukup banyak karena memang belum mendapat pekerjaan padahal telah berusaha secara maksimal dan sebagai akibat pertambahan lowongan pekerjaan yang lebih rendah daripada pertambahan tenaga kerja. Efek dari keadaan ini di dalam suatu jangka masa yang cukup panjang mereka tidak melakukan suatu pekerjaan. Jadi mereka menganggur secara nyata dan separuh waktu, dan oleh karenanya dinamakan pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka dapat pula wujud sebagai akibat dari kegiatan ekonomi yang menurun, dari kemajuan teknologi yang mengurangi penggunaan tenaga kerja, atau sebagai akibat dari kemunduran perkembangan suatu industri.

b. Pengangguran Tersembunyi

Pengangguran ini adalah tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena suatu alasan tertentu. Salah satunya adalah karena kecilnya perusahaan dengan tenaga kerja yang terlalu banyak sehingga untuk menjalankan kegiatannya tidak efisien. Kelebihan tenaga kerja yang digunakan digolongkan dalam pengangguran tersembunyi.

c. Setengah Menganggur

Pengangguran ini adalah tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena tidak ada lapangan pekerjaan, biasanya tenaga kerja setengah menganggur ini merupakan tenaga kerja yang bekerja kurang dari 35 jam selama seminggu. Mereka mungkin hanya bekerja satu hingga dua hari dalam seminggu, atau satu hingga empat jam sehari. Pekerja-pekerja yang mempunyai masa kerja seperti ini digolongkan sebagai setengah menganggur.

d. Pengangguran Bermusim

Pengangguran ini adalah tenaga kerja yang tidak bekerja karena terikat pada musim tertentu. Pengangguran seperti ini terutama di sektor pertanian dan perikanan. Pada umumnya petani tidak begitu aktif di antara waktu sesudah menanam dan panen. Apabial dalam masa tersebut mereka tidak melakukan pekerjaan lain maka mereka terpaksa menganggur.

Untuk melihat keterjangkauan pekerja (kesempatan bekerja), maka digunakan rumus Tingkat Pengangguran Terbuka. Definisi dari tingkat pengangguran terbuka ialah persentase penduduk yang mencari pekerjaan, yang mempersiapkan usaha, yang tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja dari sejumlah angkatan kerja yang ada.

Tingkat pengangguran terbuka memberikan indikasi tentang penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok penganggur. Tingkat pengangguran kerja diukur sebagai persentase jumlah penganggur terhadap jumlah angkatan kerja. Untuk mengukur

tingkat pengangguran terbuka pada suatu wilayah bisa didapat dari persentase membagi jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja dan dinyatakan dalam persen.

$$TPT = \frac{\text{jumlah pengangguran}}{\text{jumlah angkatan kerja}} \times 100$$

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah angka yang menunjukkan banyaknya pengangguran terhadap 100 penduduk yang masuk kategori angkatan kerja. Pengangguran terbuka (*open unemployment*) didasarkan pada konsep seluruh angkatan kerja yang mencari pekerjaan, baik yang mencari pekerjaan pertama kali maupun yang sedang bekerja sebelumnya. Sedang pekerja yang digolongkan setengah pengangguran (*underemployment*) adalah pekerja yang masih mencari pekerjaan penuh atau sambilan dan mereka yang bekerja dengan jam kerja rendah (di bawah sepertiga jam kerja normal, atau berarti bekerja kurang dari 35 jam dalam seminggu). Namun masih mau menerima pekerjaan, serta mereka yang tidak mencari pekerjaan namun mau menerima pekerjaan itu. Pekerja digolongkan setengah pengangguran parah (*severely underemployment*) bila ia termasuk setengah menganggur dengan jam kerja kurang dari 25 jam seminggu.

Menurut Badan Pusat Statistik / BPS, Pengangguran terbuka terdiri atas:

1. Penduduk yang sedang mencari pekerjaan
2. Penduduk yang sedang mempersiapkan usaha
3. Penduduk yang merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan
4. Penduduk yang sudah punya pekerjaan tapi belum mulai bekerja

2.1.4 Pergeseran Sektoral

Perubahan struktur (pergeseran sektoral) mengandung makna terjadinya transformasi, bukan hanya dalam bentuk fisik, tetapi juga berkaitan dengan kebiasaan atau cara memperlakukan kegiatan produksi ekonomi. Perubahan struktural telah banyak digunakan dalam studi ekonomi meskipun dengan makna dan interpretasi yang berbeda. Dalam ekonomi pembangunan, perubahan struktural umumnya dipahami sebagai pengaturan aktivitas produktif yang berbeda dalam perekonomian dan distribusi yang berbeda faktor produksinya di antara berbagai sektor ekonomi, berbagai pekerjaan, wilayah geografis, dan jenis produk (Machlup (1991) dalam Silva dan Teixeira, 2008).

Perubahan sektoral atau bisa disebut dengan istilah perubahan struktur, ialah terjadinya transformasi bukan hanya bentuk fisik melainkan kebiasaan atau cara melakukan kegiatan produksi ekonomi. Proses transformasi atau perubahan dalam struktur perekonomian suatu negara bergeser dari yang semula didominasi oleh sektor primer, seperti pertanian, ke sektor-sektor nonprimer, industri, perdagangan, dan jasa. Dengan adanya perubahan struktur atau pergeseran sektoral mengakibatkan perubahan dalam struktur produksi melalui pergeseran kesempatan kerja dan alokasi dana sekaligus memberikan nilai tambah kepada komoditi (Muhaman Amir Arham, 2014). Perubahan struktur (sektor) ekonomi yang terjadi setidaknya dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor yang didasarkan oleh sumbernya (permintaan agregat/*Aggregate Demand* (AD) dan penawaran agregat/*Aggregate Supply* (AS)),

selain itu perubahan struktur ekonomi terjadi karena adanya intervensi pemerintah (Tambunan, 2001). Pergeseran dapat diartikan dengan peran dari masing-masing sektor ekonomi mengalami perubahan, ada yang mengalami peningkatan, ada yang mengalami penurunan dan ada juga sektor yang tidak mengalami perubahan atau tetap.

2.2 Studi Terkait

Sani, dkk (2022) menganalisis pengaruh pandemi Covid-19 terhadap pengangguran, kemiskinan dan ketimpangan pendapatan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan data panel 34 provinsi di Indonesia periode 2018 semester 1 sampai 2020 semester 2, model ekonometrik yang digunakan adalah regresi panel dengan variabel *dummy*. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa pandemi Covid-19 memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan kemiskinan perkotaan dan tingkat pengangguran, tetapi tidak berpengaruh terhadap kemiskinan perkotaan. Distribusi pendapatan dimasyarakat baik di perkotaan dan perdesaan mengalami perbaikan.

Rusman (2021) melakukan penelitian dengan melakukan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Pandemi Covid-19 ini tidak hanya menimbulkan korban jiwa di Indonesia dan seluruh dunia, tetapi juga menyebabkan angka pengangguran yang semakin tinggi, serta menyebabkan menurunnya angka pertumbuhan ekonomi dan bahkan menimbulkan krisis ekonomi baik di Indonesia maupun di berbagai banyak negara di dunia.

Rahmawati, dkk. (2021) menganalisis dampak Pandemi Covid- 19 terhadap indeks pembangunan ekonomi inklusif jawa timur, Indikator tingkat kemiskinan dan ketimpangan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan antara Covid-19 adanya pengaruh inklusi di Jawa Timur. Pandemi Covid-19 menimbulkan berbagai dampak di sektor perekonomian domestik dan keberadaan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah).

Santoso dan Mukhlis (2021) menganalisis pengaruh desentralisasi fiskal (DAU, DAK, dan DBH), *foreign direct investment*, dan tenaga kerja terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia pada masa sebelum pandemi Covid-19 serta perbandingan kondisi pada saat pandemi Covid-19. Analisis data yang dilakukan adalah dengan menggunakan analisis regresi data panel pada data sebelum pandemi dan analisis deskriptif pada data selama pandemi Covid-19. Data penelitian diperoleh dari publikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (DJPK Kemenkeu), Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Badan Pusat Statistik (BPS). Data yang digunakan sejak tahun 2010 hingga tahun 2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia. Sedangkan, variabel Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, *Foreign Direct Investment*, dan Tenaga Kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia. Berdasarkan analisis deskriptif pada data selama pandemi Covid-19 didapatkan hasil bahwa kondisi ketimpangan pendapatan, desentralisasi fiskal (DAU, DAK, dan DBH), FDI, dan tenaga kerja di Indonesia pada masa pandemi Covid-19 mengalami perubahan di mana seluruh aspek mengalami penurunan. Hal ini

disebabkan pada kondisi pandemi yang membuat pemerintah melakukan kebijakan *lock down* atau yang di Indonesia dikenal dengan istilah PSBB.

Suryahadi, dkk (2020) menganalisis dampak Covid-19 terhadap kemiskinan di Indonesia. Tingkat kemiskinan meningkat dari 9,2 persen pada September 2019 menjadi 9,7 persen pada akhir tahun 2020. Ini berarti bahwa 1,3 juta lebih orang akan didorong ke dalam kemiskinan. Di bawah proyeksi paling parah, tingkat kemiskinan akan meningkat menjadi 12,4 persen, menyiratkan 8,5 juta lebih orang akan menjadi miskin. Penelitian ini mengambil data dari SUSENAS (Survei Sosial Ekonomi Nasional) yang dikumpulkan oleh BPS yaitu di antaranya data panel distribusi pengeluaran rumah tangga dan tingkat kemiskinan tahun 2019-2020.

